

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI MALUKU 2014



BPS PROVINSI MALUKU

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI MALUKU 2014

ISSN : 2442-7128

Nomor Publikasi : 81520.1517

Katalog BPS : 4102004.81

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman : 86 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dicetak Oleh : Aman Jaya - Ambon

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku merupakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Maluku antar waktu, dan perbandingannya antar kabupaten/kota, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Perlu disadari bahwa masalah yang terkait dengan kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan tidak memiliki ukuran kuantitatif yang baku, sehingga publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku 2014 ini menyajikan informasi umum tentang kesejahteraan yang meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi serta perumahan dan lingkungan. Sumber data yang digunakan adalah data yang tersedia di BPS dan instansi lain di luar BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan sumber data utama, sedangkan khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terimakasih dengan harapan agar penyempurnaan terus dilakukan secara profesional. Akhirnya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan publikasi serupa dimasa mendatang tetap kami hargai.

Ambon, September 2015
Kepala BPS Provinsi Maluku



Diah Utami

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
Tinjauan Umum	ix
I. Kependudukan	1
II. Kesehatan dan Gizi	10
III. Pendidikan	19
IV. Ketenagakerjaan	29
V. Taraf dan Pola Konsumsi	36
VI. Perumahan dan Lingkungan	47
Istilah Teknis	53

DAFTAR TABEL

KEPENDUDUKAN

Tabel 1.1	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Maluku, Tahun 1980-2014	4
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Maluku, Tahun 2014	5
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Maluku, Tahun 2008-2014	6
Tabel 1.4	Persentase Wanita Yang Melakukan Perkawinan Pertama Usia Kurang dari 16 Tahun di Provinsi Maluku, 2010-2014	8
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Wanita Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	9

KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 2.1	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Maluku, Tahun 2005 dan 2010	12
Tabel 2.2	Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2014	13
Tabel 2.3	Persentase Balita Umur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di Provinsi Maluku, Tahun 2008-2014	14

Tabel 2.4	Persentase Balita Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2007	15
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Pertama dan Terakhir di Provinsi Maluku, Tahun 2010 - 2014	16
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan di Provinsi Maluku, Tahun 2010 - 2014	17
Tabel 2.7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Maluku, Tahun 2010 - 2014	18

PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	22
Tabel 3.2	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	22
Tabel 3.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	23
Table 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, Tahun 2014	25
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2014	26
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Provinsi Maluku, 2006/2007-2010/2014	27

KETENAGAKERJAAN

Tabel 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Maluku, 2010-2014	31
Tabel 4.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2010- 2014	32
Tabel 4.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku, 2010- 2014	34
Tabel 4.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku, 2010-2014	35

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 5.1	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	39
Tabel 5.2	Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari di Provinsi Maluku, Tahun 2007-2012	41
Tabel 5.3	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) di Provinsi Maluku, Tahun 2012-2014	42
Tabel 5.4	Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Gini di Provinsi Maluku, Tahun 2005-2014	43
Tabel 5.5	Pengeluaran Rata-rata Nominal (Rp) dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014	45

PERUMAHAN

Tabel 6.1	Beberapa Indikator Perumahan di Provinsi Maluku, Tahun 2009-2014	49
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Provinsi Maluku, Tahun 2014	51

<https://maluku.bps.go.id>
<http://maluku.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gbr.1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Provinsi Maluku, 1961-2014	3
Gbr.1.2	Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Maluku, 2007-2014	6
Gbr.2.1	Persentase Balita Menurut Status Gizi di Provinsi Maluku, 2003, 2005 & 2007	14
Gbr.2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri dan Berobat Jalan di Provinsi Maluku, 2008-2014	16
Gbr.3.1	Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Maluku, 2008-2014	21
Gbr.3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku, 2010-2014	23
Gbr.3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Maluku, 2008-2014	24
Gbr.3.4	Rasio Murid-Guru di Provinsi Maluku, 2008/2009 - 2010/2014	26
Gbr.3.5	Rasio Murid-Kelas di Provinsi Maluku, 2008/2009 - 2010/2014	27
Gbr.4.1	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, 2009-2014	31
Gbr.4.2	TPAK, TPT dan TKK di Provinsi Maluku, 2009-2014	32

Gbr.5.1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku, 2009-2014	38
Gbr.5.2	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Maluku, 2010-2014	45
Gbr.6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Rumah di Provinsi Maluku, 2008-2014	50

<https://maluku.bps.go.id>
<http://maluku.bps.go.id>

Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Maluku, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar kabupaten/kota, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, rumah tangga, dan penduduk. Selain itu, indikator dampak juga ikut disajikan untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana: input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu, kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, serta perumahan dan lingkungan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

Taraf kesejahteraan rakyat Maluku secara umum mengalami peningkatan yang berarti dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi

Perkembangan Taraf Kesejahteraan Rakyat

dalam konteks demografis, dimana walaupun jumlah penduduk masih terus bertambah tetapi kecepatan pertumbuhannya mulai berkurang sebagai akibat berkurangnya angka kelahiran.

Peningkatan taraf kesejahteraan rakyat antara lain ditunjukkan oleh dua indikator yang berdampak untuk bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu kenaikan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.

Tabel A. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008-2014

Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Maluku Tenggara Barat	67,58	68,16	68,83	69,23	69,57	69,87	n.a
Maluku Tenggara	71,45	71,98	72,45	72,85	73,27	73,6	n.a
Maluku Tengah	69,63	70,33	70,86	71,25	71,55	71,81	n.a
Buru	68,03	68,69	69,36	69,75	70,54	70,79	n.a
Kepulauan Aru	69,36	69,92	70,09	70,33	70,91	71,29	n.a
Seram Bagian Barat	68,67	69,29	69,64	70,07	70,40	70,75	n.a
Seram Bagian Timur	67,06	67,72	68,09	68,53	68,90	69,11	n.a
Maluku Barat Daya	65,96	66,24	66,60	66,99	67,38	67,67	n.a
Buru Selatan	67,71	68,10	68,78	69,13	69,97	70,23	n.a
Ambon	77,86	78,37	78,56	78,97	79,41	79,58	n.a
Tual	75,90	76,36	76,51	77,10	77,62	77,91	n.a
Maluku	70,38	70,96	71,42	71,87	72,42	72,70	66,74

**) Penghitungan IPM menggunakan metode baru*

Sumber: BPS

Dalam hal pengukuran secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk memotret tingkat dan perkembangan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota. Tabel

A. menunjukkan bahwa IPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meningkat selama periode 2008 hingga 2013. Penurunan di tahun 2014 terjadi karena perubahan metode penghitungan IPM semata, namun data menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat.

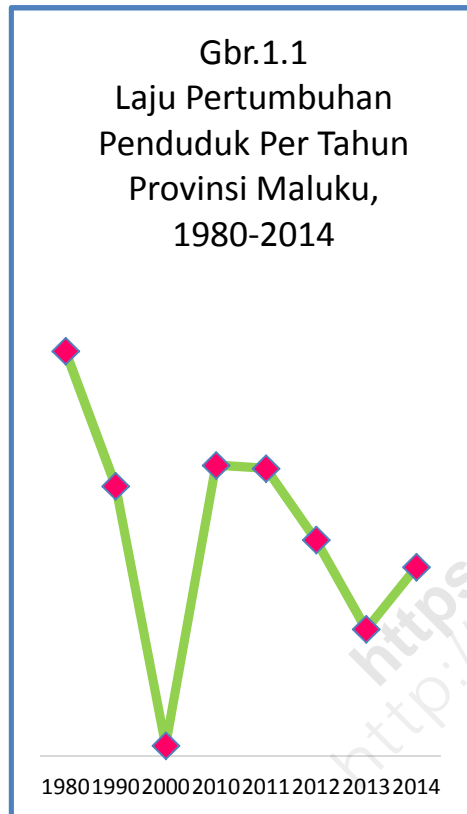
Namun dibalik keberhasilan tersebut diatas, sejumlah indikator lain justru masih menunjukkan indikasi yang masih kurang baik. Angka pengangguran yang masih tinggi, persentase pengeluaran untuk makanan yang masih diatas 50 persen, serta jumlah penduduk miskin yang masih tinggi.

Sebagai modal dasar atau asset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

*P*enduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional atau *human capital*. Sebagai modal dasar atau asset pembangunan, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya terlebih lagi jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan berkualitas yang akan menjadi sumber potensi yang kuat dalam pembangunan. Namun, potensi jumlah penduduk yang besar tersebut tidak akan menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Sejalan dengan itu, diperlukan data-data kependudukan yang dapat mendukung setiap kegiatan perencanaan pembangunan khususnya perencanaan input dan output pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan.

Data dasar mengenai kependudukan yang banyak digunakan terutama adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pada kegiatan perencanaan output pembangunan, data jumlah jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan beberapa kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur antara lain digunakan untuk menentukan kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur.



1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah bagian dari pembangunan. Pembangunan tanpa penduduk atau sebaliknya penduduk tanpa pembangunan tidak ada artinya. Karena pembangunan dilakukan untuk dinikmati oleh penduduk dan sebaliknya yang membuat dan merencanakan pembangunan adalah penduduk atau manusia.

Namun secara kuantitas, jumlah penduduk yang banyak bukanlah jaminan untuk kelancaran pembangunan suatu wilayah. Apalagi pada era-modernisasi dan perdagangan bebas ini, dimana pembangunan lebih membutuhkan penduduk yang berkualitas. Lalu bagaimana menghasilkan penduduk yang berkualitas, jika persoalan-persoalan pembangunan hidup ada dimana-mana bahkan sudah menjadi penyakit sosial seperti kemiskinan, gizi buruk, ketimpangan sosial dll.

Penulisan indikator kesejahteraan rakyat pada bab ini menyajikan beberapa data kuantitatif kependudukan yang bisa dijadikan bahan monitoring, evaluasi dan perencanaan pembangunan kedepan,

khususnya dalam bidang kependudukan agar dapat tercipta suatu kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Penulisan ini akan membahas kependudukan dari sudut jumlah dan laju pertumbuhan, persebaran dan kepadatan, komposisi penduduk serta fertilitas.

1.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula tentu saja tidak menjadi masalah, namun bila terjadi sebaliknya, maka diperlukan kerja keras semua pihak untuk mencegah timbulnya ‘penyakit sosial’ seperti yang disebutkan diatas. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Maluku, Tahun 1980-2014

Tahun	Total	Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)
1980	897.951	3,9
1990	1.157.878	2,6
2000	1.166.300	0,1
2010	1.533.506	2,8
2011	1.575.965	2,77
2012	1.608.786	2,08
2013	1.628.413	1,22
2014	1.657.409	1,82

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Secara absolut, jumlah penduduk Maluku dalam kurun waktu 1980-2013 mengalami peningkatan.

Demikian juga dengan tingkat pertumbuhannya per tahun dari tahun 1980-2013 terus mengalami laju peningkatan, dimana laju pertumbuhan penduduk Maluku pada periode 2010 ke 2014 sebesar 1,82 persen per tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk pernah mengalami penurunan yang tajam pada periode 1990 ke 2000 yang disebabkan terjadinya konflik sosial dimana banyak penduduk keluar dari Maluku.

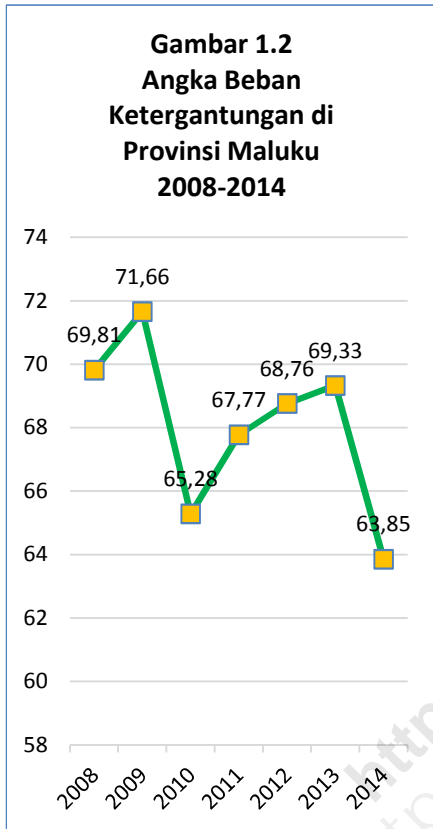
1.3 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk dengan kualitas yang memadai dan kuantitas yang cukup dalam suatu wilayah, perlu diikuti dengan penyebaran yang merata agar tidak terjadi pemusatan maupun tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan. Penyebaran dan kepadatan penduduk di Maluku dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Secara umum, penyebaran penduduk di Maluku sampai dengan tahun 2014 tidak merata terutama Kota Ambon yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 0,70 persen dari wilayah Provinsi Maluku menampung 28,46 persen dari seluruh penduduk Maluku dengan tingkat kepadatan 903 jiwa/km². Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan luas 19,29 persen hanya menampung 6,61 persen penduduk Maluku dengan tingkat kepadatan 10 jiwa/km².

Kenyataan ini merupakan konsekuensi dari keberadaan Kota Ambon yang merupakan ibukota Propinsi Maluku yang serta merta menjadikannya sebagai pusat kegiatan perekonomian, sosial, politik dan budaya. Sehingga tidak heran kalau kemudian Kota Ambon banyak dijadikan daerah tujuan berbagai

lapisan masyarakat, baik dari lingkungan masyarakat Maluku sendiri maupun dari luar Maluku.



Tabel 1.2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Maluku, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (%)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Maluku Tenggara Barat	19,29	6,61	10
Maluku Tenggara	6,29	5,94	29
Maluku Tengah	21,40	22,22	32
Buru	10,09	7,48	20
Kepulauan Aru	11,57	5,43	14
Seram Bagian Barat	7,47	10,19	42
Seram Bagian Timur	7,29	6,44	26
Maluku Barat Daya	8,45	4,34	16
Buru Selatan	6,98	3,51	15
Ambon	0,70	23,86	903
Tual	0,47	3,97	235
Maluku	100,00	100,00	29

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Fenomena yang ditunjukkan dari Tabel 1.2 adalah belum meratanya penyebaran penduduk di provinsi seribu pulau ini. Daerah yang wilayahnya luas justru memiliki kepadatan penduduk di bawah daerah dengan luas wilayah lebih kecil. Hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah tersebut, karena penduduk

adalah salah satu modal utama dalam pembangunan. Lebih dikhawatirkan lagi, apabila jarangya penduduk pada satu daerah tidak ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai bagi pembangunan.

Perlu disadari bahwa semakin padat penduduk di suatu daerah, tentu akan diikuti oleh meningkatnya permintaan akan kebutuhan-kebutuhan oleh penduduk itu sendiri. Apabila permintaan ini tidak seimbang dengan produksi kebutuhan penduduk, maka akan berdampak pada ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah penyebaran penduduk, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, perlu mendapat perhatian yang serius dari mereka yang berkepentingan didalamnya, demi optimalisasi pelaksanaan pembangunan maupun pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas.

Struktur umur penduduk Maluku masih tergolong penduduk “muda”, karena masih memiliki pola yang sama dengan periode sebelumnya, dimana proporsi penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun masih cukup tinggi.

Dampak dari keberhasilan pembangunan bidang kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, khususnya kelompok umur 0-14 tahun yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun)

untuk meningkatkan kualitas dirinya. Angka beban tanggungan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Maluku, Tahun 2008-2012

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun	Angka Beban Ketergantungan
2009	36,96	58,25	4,78	71,66
2010	35,34	60,51	4,16	65,28
2011	36,66	59,61	3,74	67,77
2012	36,65	59,26	4,09	68,76
2013	36,86	59,06	4,08	69,33
2014	34.97	61.03	4.00	63,85

Sumber: Susenas

Pada tahun 2014, angka beban ketergantungan naik menjadi 63,85 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 63 penduduk usia tidak produktif.

1.4 Fertilitas

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia, karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Perempuan yang kawin pada usia yang sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan. Hal ini berdampak pada keselamatan ibu

dan anak. Dengan memberi kesempatan kepada perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang perempuan, terutama di daerah perdesaan.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase penduduk wanita usia 10 tahun keatas dengan usia perkawinan pertama kurang dari 16 tahun di Maluku pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun begitu, jika dibandingkan menurut wilayah, dari tahun 2009-2010 persentase wanita usia 10 tahun keatas dengan usia perkawinan pertama kurang dari 16 tahun di daerah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Tabel 1.4. Persentase Wanita Yang Melakukan Perkawinan Pertama Usia Kurang dari 16 Tahun di Provinsi Maluku, 2009-2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
2009	2,20	5,33	4,50
2010	2,64	5,00	4,13
2011	2,98	4,05	3,67
2012	3,13	5,27	4,48
2013	2,48	3,94	3,95
2014	3,42	3,76	3,57

Sumber: Susenas

Selain penundaan usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi oleh para wanita usia subur juga mampu mempengaruhi pola fertilitas karena dapat digunakan untuk mencegah ataupun menjarangkan kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Maluku pada tahun 2014 sebesar 41,71

persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.5. Persentase Penduduk Wanita Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Provinsi Maluku, Tahun 2009-2014

Menggunakan Alat Kontrasepsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ya	36,29	39,54	39,38	41,91	40,46	41,71
Tidak	63,71	60,46	60,62	58,09	59,54	58,29

Sumber: Susenas

Adanya penurunan persentase wanita kawin yang menggunakan alat kontrasepsi ternyata berdampak pada peningkatan jumlah penduduk secara absolut yang terjadi di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, sosialisasi dan program penggunaan alat kontrasepsi/keluarga berencana perlu terus ditingkatkan.

Derajat kesehatan penduduk yang meningkat merupakan salah satu cerminan dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan). Derajat kesehatan penduduk yang meningkat merupakan salah satu cerminan dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal ini menjadi penting sebab SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Dalam rangka membangun kualitas SDM, berbagai program pemerintah senantiasa memperhatikan dan memberikan prioritas pada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatan sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong

persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain melalui upaya pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan pengadaan/peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Seperti tercantum pada Tabel 2.1, berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, pada tahun 2010 diperkirakan terjadi penurunan angka kematian bayi dari 38 per 1000 kelahiran pada tahun 2005 menjadi 30 per 1000 kelahiran pada tahun 2010. Sementara angka harapan hidup penduduk Maluku pada tahun 2005 adalah 67,7 tahun dan diproyeksikan lima tahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 69,8 tahun. Pada tabel tersebut juga ditunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2005, angka harapan hidup perempuan 69,7 tahun diperkirakan tahun 2010 menjadi 71,8 tahun sementara laki-laki sebesar 65,8 tahun dan pada tahun 2010 diperkirakan menjadi 67,8 tahun.

Tabel 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Maluku, Tahun 2005 dan 2010

Indikator Derajat Kesehatan	2005			2010		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
Angka Kematian Bayi	42, 8	32, 4	37, 7	34, 1	25, 3	29, 8
Angka Harapan Hidup	65, 8	69, 7	67, 7	67, 8	71, 8	69, 8

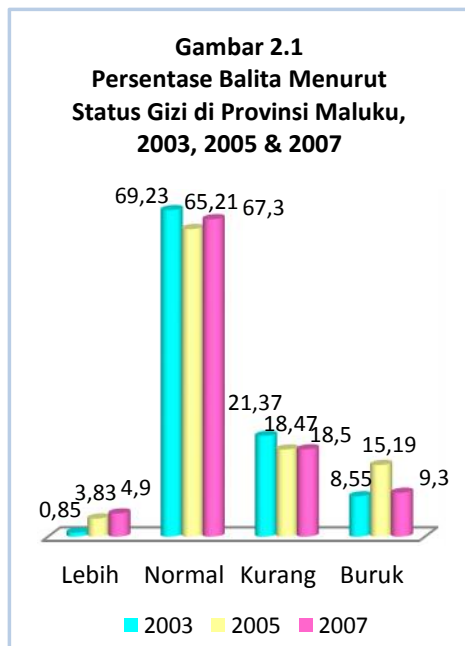
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, BPS

Informasi status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk yang antara lain dapat dilihat melalui indikator kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya tahun 2014 sebesar 11,61 persen.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Buru lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan bila dilihat menurut jenis kelamin, pada tingkat provinsi angka kesakitan perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 11,81 persen dan 11,40 persen.

Tabel 2.2. Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Maluku Tenggara Barat	6,16	7,44	6,79
Maluku Tenggara	9,30	7,72	8,49
Maluku Tengah	13,01	10,33	11,68
Buru	18,35	17,82	18,09
Kepulauan Aru	8,64	7,33	8,01
Seram Bagian Barat	14,38	16,38	15,36
Seram Bagian Timur	14,81	14,37	14,59
Maluku Barat Daya	10,37	13,49	11,92
Buru Selatan	10,95	8,36	9,69



Ambon	9,66	9,56	9,61
Tual	13,59	17,11	15,38
Maluku	11,81	11,40	11,61

Sumber: Susenas

2.2 Pemberian ASI dan Gizi Balita

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Rata-rata lama balita disusui di Maluku mengalami peningkatan dalam periode tahun 2009 sampai 2013, dimana rata-rata lama balita yang disusui pada tahun 2013 adalah 15,82 bulan mengalami sedikit peningkatan dalam lima tahun terakhir dari 15,78 bulan pada tahun 2012.

Tabel 2.3. Persentase Balita Umur 2-4 Tahun Menurut Lamanya Disusui di Provinsi Maluku, Tahun 2011-2014

Lama Disusui (Bulan)	2011	2012	2013	2014
5	5,35	5,46	3,86	6,24
6-11	17,24	13,00	15,39	15,21
12-17	38,47	45,06	43,29	38,53
18-23	15,39	12,44	11,64	12,81
24	23,55	24,04	25,81	27,22
Rata-rata lama disusui	15,75	15,78	15,82	15,97

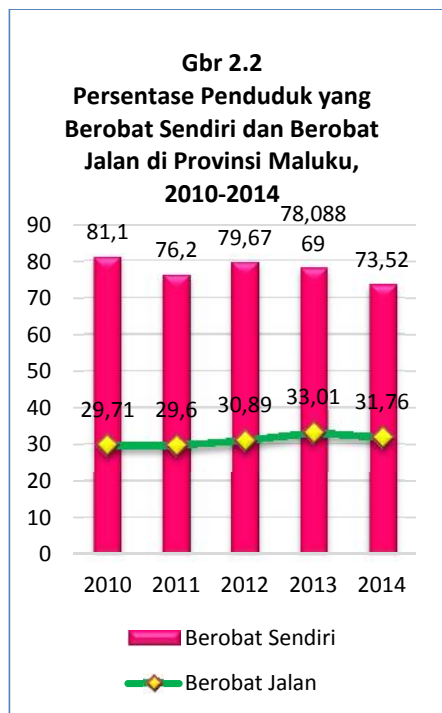
Sumber: Susenas

Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita. Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga yang dilakukan BPS pada tahun 2005 menunjukkan bahwa persentase balita berstatus gizi normal di Maluku sebesar 65,21 persen dan gizi buruk sebesar 15,19 persen. Sedangkan pada tahun 2007 hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 (Riskesdas 2007) yang dilakukan Departemen Kesehatan menunjukkan terjadi penurunan persentase balita dengan status gizi buruk menjadi 9,3 persen.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah yang balitanya berstatus gizi normal terbesar yaitu sebesar 76,6 persen, sedangkan Kota Ambon merupakan daerah dengan balita berstatus gizi buruk terendah sebesar 4,4 persen. Walaupun demikian, hal ini perlu dicermati lebih lanjut. Status gizi erat kaitannya dengan tingkat intelektual seseorang untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 2.4. Persentase Balita Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Gizi lebih	Gizi Normal	Gizi Kurang	Gizi Buruk
Maluku Tenggara Barat	3,5	67,2	22,1	7,2
Maluku Tenggara	1,6	67,1	22,1	9,2
Maluku Tengah	2,9	68,7	18,8	9,6
Buru	5,7	56,7	21,4	16,1
Kepulauan Aru	3,0	56,8	27,8	12,4
Seram Bagian Barat	10,8	65,4	13,0	10,9
Seram Bagian Timur	4,4	64,7	20,6	10,3
Ambon	7,0	76,6	12,0	4,4



Maluku	4,9	67,3	18,5	9,3
--------	-----	------	------	-----

Sumber: *Risikesdas, Kemenkes*

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu penentu utama. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan bayi. Masih banyak masyarakat yang mempercayakan penolong persalinan pada mereka yang bukan tenaga kesehatan, seperti dukun, tetangga atau sanak keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang tinggal di daerah perdesaan.

Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik pada penolong persalinan pertama maupun terakhir mengalami peningkatan. Sementara itu, persentase penolong persalinan terakhir oleh bukan tenaga kesehatan mengalami penurunan.

Tabel 2.5. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Pertama dan Terakhir di Provinsi Maluku, Tahun 2012 – 2014.

Penolong Persalinan	Pertama			Terakhir		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Tenaga Kesehatan	50,97	0.93	52.61	52,61	54.63	56.12
- Dokter	8,89	7.33	6.45	9,48	7.60	6.59
- Bidan	41,46	43.01	45.88	42,34	46.46	49.22
- Lainnya	0,62	0.59	0.27	0,79	0.56	0.30

Bukan Tenaga Kesehatan	49,03	49.07	47.39	47,39	45.37	43.88
- Duku n Tradi sional	45,43	43.37	44.73	44.85	41.88	41.92
- Lain nya	3,60	5.70	2.66	2,55	3.49	1.97

Sumber: Susenas

Selain tenaga penolong persalinan bayi, Susenas juga menyajikan data tentang upaya yang dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Jika dibandingkan antara berobat sendiri dengan berobat jalan, pada tahun 2014 penduduk yang sakit untuk mengobati sakitnya lebih banyak yang berobat sendiri (73,52 persen) daripada berobat jalan (31,76 persen).

Tabel 2.6. Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Pengobatan yang Digunakan di Provinsi Maluku, Tahun 2011- 2014

Jenis Pengobatan	2011	2012	2013	2014
Modern	90,51	90,93	90,49	89,41
Tradisional	26,95	23,93	27,15	25,72
Lainnya	2,28	3,73	2,18	2,31

Sumber: Susenas

Bagi penduduk yang berobat sendiri, pengobatan secara modern tetap menjadi pilihan utama mereka, bahkan persentase penduduk yang berobat dengan pengobatan modern mengalami penurunan dari 90,49 persen tahun 2013 menjadi

89,41 persen tahun 2014. Sejalan dengan itu penduduk yang menggunakan pengobatan tradisional juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, puskesmas/pustu merupakan jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk yang berobat jalan (49,63 persen), diikuti praktek dokter/poliklinik (25,38 persen) dan praktek nakes (19,23 persen).

Tabel 2.7. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Maluku, Tahun 2011-2014

Tempat Berobat	2011	2012	2013	2014
Rumah Sakit	9,36	8,31	9,64	8.98
Prakter Dokter	14,83	19,67	20,00	25.38
Puskesmas/Pustu	58,69	58,14	52,32	49.63
Petugas Kesehatan	13,81	13,81	21,35	19.23
Batra	0,00	0,03	1,77	0.85
Dukun/Lainnya	3,31	3,88	0,40	1.41

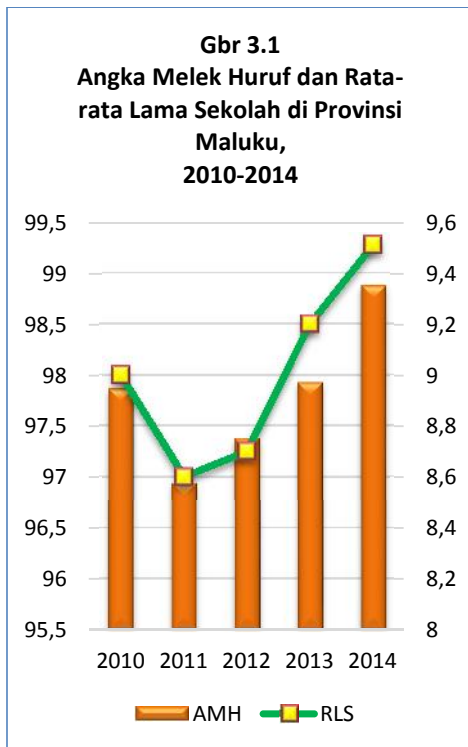
Sumber: Susenas

Undang-Undang 1945 mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk untuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan penduduk merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) atau produktivitas penduduk suatu negara. Suatu negara dikatakan makin maju apabila SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Pendidikan penduduk merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) atau produktivitas suatu negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan selain merupakan sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan, juga merupakan sarana untuk membentuk watak dan peradaban yang sesuai dengan bangsa yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa output/keluaran yang merupakan hasil proses pembelajaran lembaga pendidikan adalah SDM yang terampil, berilmu, handal, kreatif dan berakhlak mulia.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Bagi penduduk usia muda pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja



yang berkualitas secara perorangan atau kelompok. Beberapa cara untuk menampilkan hasil kerja produktif diantaranya dengan mengasah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan formal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar, menengah, baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula tidak kalah pentingnya peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Bahkan, sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

3.1 Angka Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin.

Angka melek huruf di Maluku dalam empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dari 97,79 persen pada tahun 2010 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 96,94 kemudian mengalami peningkatan menjadi 97,38 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 97,93 pada tahun 2013 dan terus meningkat menjadi 98,88 di tahun 2014. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka melek huruf laki-laki masih selalu lebih tinggi dari angka melek huruf perempuan, dimana pada tahun 2013 angka melek huruf laki-laki sebesar 98,54 persen sedangkan perempuan hanya 97,32 persen.

Tabel 3.1. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2010 - 2013

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	98,34	97,60	98,17	98,54	99,21
Perempuan	97,25	96,27	96,58	97,32	98,56
Total	97,79	96,94	97,38	97,93	98,88

Sumber: Susenas

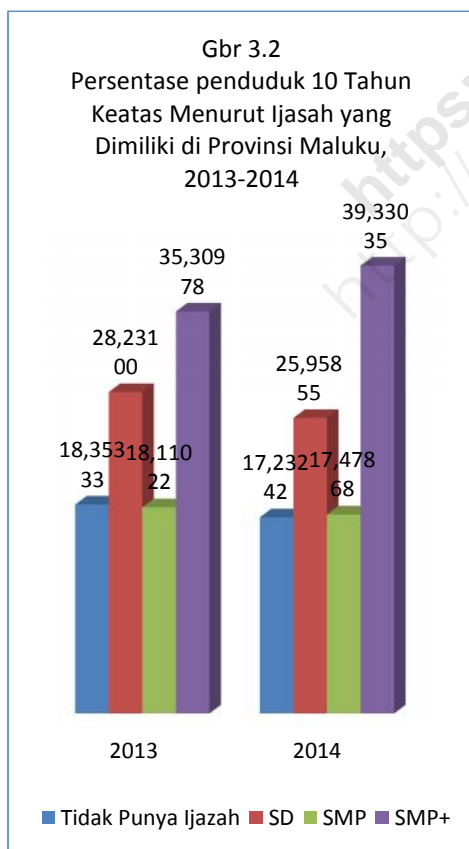
Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

Tabel 3.2. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014

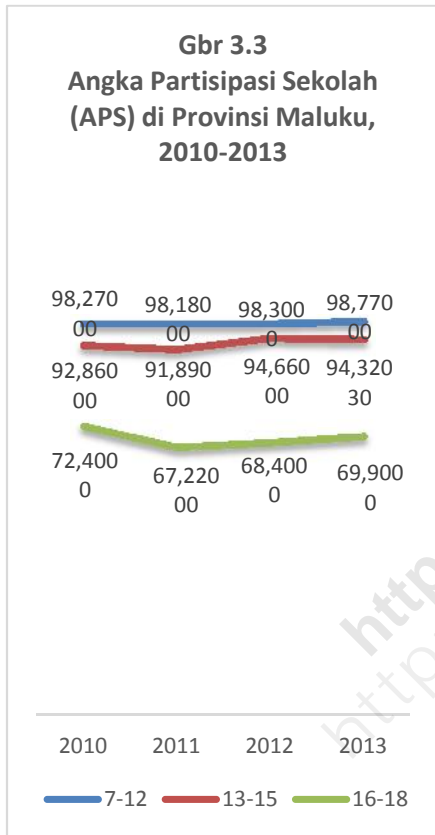
Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	9,2	8,8	9,31	9,37	9,69
Perempuan	8,8	8,4	8,99	9,04	9,34
Total	9,0	8,6	9,15	9,20	9,51

Sumber: Susenas

Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2010



rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,0 tahun dan meningkat menjadi 9,51 tahun pada tahun 2014. Hal ini berarti, program WAJAR 6 Tahun yang dicanangkan pemerintah telah berhasil dilaksanakan, dan menuju sukses berikutnya yakni program Wajar 9 Tahun. Hal ini terbukti dari meningkatnya rata-rata lama sekolah sehingga mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan, masing-masing 9,69 tahun untuk laki-laki dan 9,34 tahun untuk perempuan di tahun 2014.



Dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Maluku masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan sumber daya manusia.

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas.

Penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang SMP ke atas mencapai 35,31 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,33 persen. Sementara itu jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki lebih tinggi bila dibandingkan perempuan dalam hal yang sudah menamatkan pendidikan pada jenjang

SMP keatas.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku, Tahun 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD	18.2 2	18.4 9	18.3 5	16.6 2	17.8 6	17.2 3
Sekolah Dasar	27.2 8	29.2 0	28.2 3	25.4 5	26.4 8	25.9 6
S M P	18.2 3	17.9 9	18.1 1	17.4 4	17.5 2	17.4 8
Sekolah Menengah	29.7 2	26.1 4	27.9 4	32.8 9	28.2 4	30.5 8
Diploma I/II/III	1.36	3.26	2.30	1.64	3.25	2.44
D IV/S1/S2/S3	5.19	4.93	5.06	5.97	6.65	6.31
S M P +	54.5 0	52.3 1	53.4 2	57.9 3	55.6 7	50,5 0

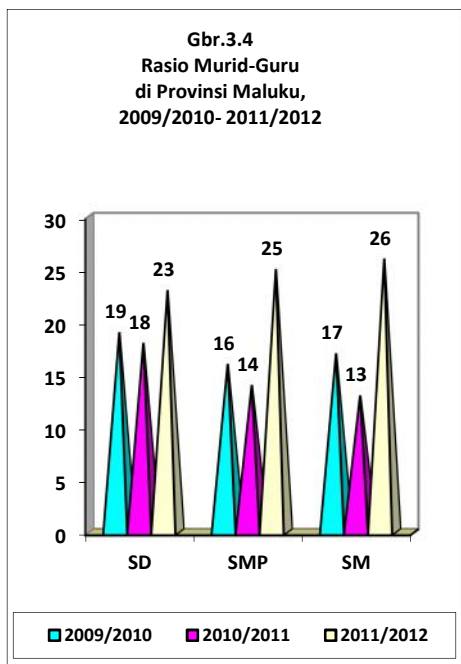
Sumber: Susenas

Persentase penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMP mengalami penurunan dari 18,10 persen menjadi 17,48 persen.

3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Secara umum, semakin tinggi kelompok



umurnya semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 sebesar 99,19 persen, kelompok umur 13-15 sebesar 96,32 persen, kelompok umur 16-18 sebesar 77,48 persen dan kelompok umur 19-24 sebesar 36,44 persen.

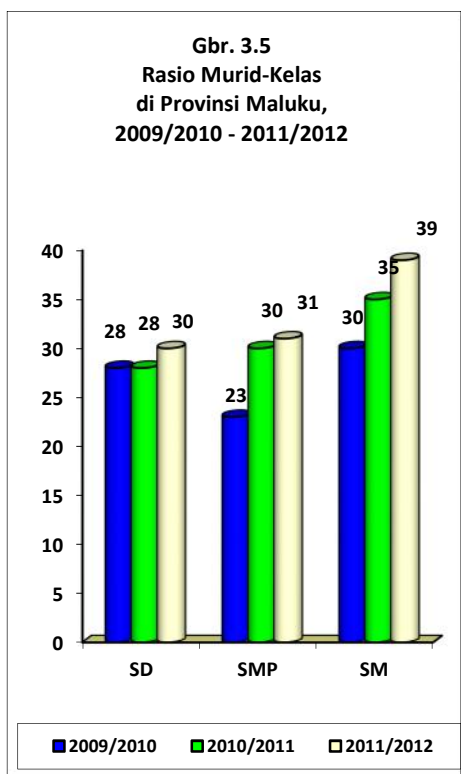
Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2014 Kota Ambon merupakan daerah tingkat dua yang angka partisipasinya pada kelompok umur 19-24 tahun lebih tinggi dari daerah tingkat dua lainnya.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Maluku, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	7-12	13-15	16-18	19-24
Maluku Tenggara Barat	99.62	94.59	79.99	16.97
Maluku Tenggara	99.68	95.82	77.92	30.9
Maluku Tengah	99.02	97.11	79.34	32.46
Buru	98.47	91.79	68.02	24.54
Kepulauan Aru	98.73	89.84	80.08	19.08
Seram Bagian Barat	98.33	96.34	81.38	21.12
Seram Bagian Timur	98.34	92.27	74.54	12.58
Maluku Barat Daya	99.59	98.32	74.64	11.08
Buru Selatan	99.46	97.56	73.46	15.16
Ambon	100	100	77.39	58.79
Tual	99.74	98.55	81.04	40.61
Maluku	99.19	96.35	77.48	36.44

Sumber: Susenas

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur



proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SM untuk penduduk usia 16-18 tahun. Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dengan sasaran dari program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP).

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2013 untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah 92,52 persen pada jenjang pendidikan SD, pada jenjang pendidikan SLTP sebesar 66,89 persen dan 55,36 persen pada jenjang pendidikan SLTA. Hal ini juga menunjukkan, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi murni.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA	PT
Maluku Tenggara Barat	98.33	73.19	65.81	10.53
Maluku Tenggara	94.89	74.77	68.32	30.11
Maluku Tengah	91.67	74.43	61.93	29.11
Buru	94.64	72.72	59.8	21.67
Kepulauan Aru	95.43	61.8	62.55	13.74
Seram Bagian Barat	93.72	75	73.91	16.43
Seram Bagian Timur	97.13	71.17	63.21	8.76
Maluku Barat Daya	99.16	81.74	57.83	0

Buru Selatan	98.63	82.88	67.07	8.36
Ambon	91.25	69.88	57.33	58.52
Tual	87.47	72.55	66.59	35.66
Maluku	93.74	73.1	62.6	33.46

Sumber: Susenas

3.3 Rasio Murid-Guru dan Murid-Kelas

Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SMP harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terlaksana. Guna mengatasi kekurangan daya tampung siswa, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah atau kabupaten/kota yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan dengan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SMP dengan prioritas gedung yang rusak berat. Upaya lainnya dilakukan dengan mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Tabel 3.6. Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Provinsi Maluku, 2007/2008–2011/2012

Tahun Ajaran	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Kelas		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
2007/2008	24	17	20	30	29	36
2008/2009	21	18	20	27	31	38

2009/2010	19	16	17	28	31	30
2010/2011	18	14	13	28	30	35
2011/2012	23	25	26	30	31	39

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Maluku

Perkembangan fasilitas pendidikan yang digambarkan melalui rasio murid-guru dan rasio murid-kelas selama empat tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.6. Pada tahun ajaran 2011/2012 seorang guru rata-rata mengajar 23 murid SD. Jumlah ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 18 murid. Sedangkan rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SMP sebesar 25 murid diajar oleh satu orang guru. Sementara pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, rata-rata 26 murid diajar oleh satu orang guru.

Salah satu fasilitas penunjang utama pendidikan adalah ruang kelas, dimana daya tampung kelas terhadap banyaknya murid pada setiap jenjang pendidikan haruslah seimbang. Pada tahun ajaran 2011/2012, sarana pendidikan untuk tingkat SD terlihat cukup memadai dimana setiap kelas menampung sebanyak 30 murid. Sementara banyaknya murid yang belajar di setiap kelas pada jenjang pendidikan SMP selama tahun ajaran 2011/2012 ada sebanyak 31 murid dan mengalami sedikit peningkatan dari tahun ajaran 2010/2011 dengan rata-rata 30 murid setiap kelasnya. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas setiap kelas dapat menampung 39 murid.

Dengan semakin besarnya rasio murid-kelas

yang berbanding lurus dengan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan penyediaan sarana pendidikan belum dapat mengimbangi penambahan murid.

<https://maluku.bps.go.id>
<http://maluku.bps.go.id>

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat dilapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas.

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan dan termasuk mereka yang putus asa mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, yaitu mereka yang memiliki kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti tidak mampu bekerja, pensiun, dsb.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam usia kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Pada tahun 2014, jumlah angkatan kerja mencapai 672.304 orang. Sementara jumlah penduduk yang bekerja adalah sebanyak 601.651 orang dan penduduk yang pengangguran mencapai 70.653 orang.

Peningkatan penawaran kerja di Maluku tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran.

Tabel 4.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di

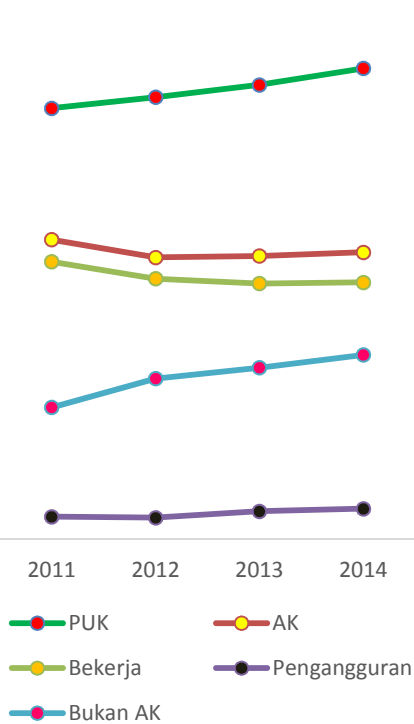
Bekerja merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Provinsi Maluku, 2011-2014

Kegiatan Utama	2011	2012	2013	2014
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	1.010.287	1.035.915	1.064.763	1.103.643
Angkatan Kerja	701.893	659.953	663.481	672.304
- Bekerja	650.112	610.362	598.792	601.651
- Pengangguran Terbuka	51.781	49.591	64.689	70.653
Bukan Angkatan Kerja	308.394	375.962	401.282	431.339
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	69,47	63,71	62,31	60,92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	7,38	7,51	9,75	10,51

Sumber: Sakernas

Gbr. 4.1 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, 2011-2014



Tabel 4.2. menyajikan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut wilayah. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2014 sebanyak 231 029 orang di daerah perkotaan dan 370.622 di daerah pedesaan.

Sedangkan tingkat pengangguran bila dilihat menurut wilayah, maka pada 2014 pengangguran di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dari pengangguran di daerah pedesaan yaitu masing-masing sebesar 9,32 persen untuk daerah pedesaan dan 12,35 persen untuk daerah perkotaan.

Sementara itu bila dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pengangguran laki-laki meningkat dari 8,55 persen pada tahun 2013 menjadi 9,20 persen pada tahun 2014. Sejalan dengan hal tersebut tingkat pengangguran perempuan naik dari 11,73 persen pada tahun 2013 menjadi 12,69 persen pada tahun 2014. Hal yang menarik adalah bahwa tingkat pengangguran perempuan selalu lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel 4.2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2012-2014

Tahun	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Lk	Pr	
2012					
- Angkatan Kerja	222,865	437,088	408.496	251.457	659.953
- Bekerja	203.175	407.187	379.729	230.633	610.362

- Pengangguran (%)	8,83	6,84	7,04	8,28	7,51
2013					
- Angkatan Kerja	249.308	414.173	413.559	249.922	663.481
- Bekerja	217.677	381.115	378.197	220.595	598.792
- Pengangguran (%)	7,98	12,69	8,55	11,73	9,75
2014					
- Angkatan Kerja	32 555	408 720	381 598	252 026	672 304
- Bekerja	231 029	370 622	420 278	220 053	601 651
- Pengangguran (%)	12,35	9,32	9,20	12,69	10,51

Sumber: Sakernas

4.2 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dilihat dari masih dominannya sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan relatif tingginya sumbangan nilai tambah sektor pertanian, terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka Maluku masih dapat digolongkan sebagai daerah pertanian.

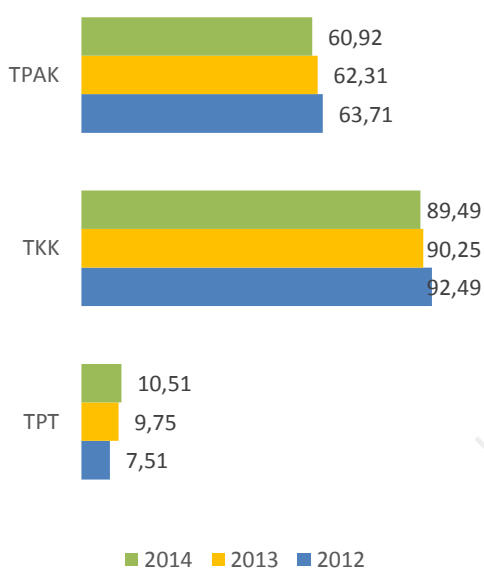
Tabel 4.3 memperlihatkan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Secara umum selama periode 2013-2014, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan, namun ada pula beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 289 357 orang atau sebesar 48,09 persen. Secara keseluruhan, perubahan jumlah penduduk yang bekerja di masing-masing sektor (lapangan pekerjaan utama) dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Dari tujuh pembedaan status pekerjaan yang terekam pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dapat diidentifikasi dua kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus diluar itu.

Berdasarkan Tabel 4.4 tampak bahwa pekerja pada kegiatan formal mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014, dimana mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar mengalami sedikit penurunan namun yang berstatus buruh/karyawan mengalami peningkatan.

Tabel 4.3. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku, 2012-2014

Gbr.4.2
TPAK, TPT dan TKK
di Provinsi Maluku, 2012-2014



Lapangan Pekerjaan Utama	2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	287.832	48,07	287.832	48,07	289 357	48.09
Pertambangan dan Penggalian	9.629	1,61	9.629	1,61	9 705	1.61
Industri	20.000	3,34	20.000	3,34	20 248	3.37
Listrik, Gas, dan Air Minum	2.637	0,44	2.637	0,44	1 465	0.24
Konstruksi	27.897	4,66	27.897	4,66	21 472	3.57
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	83.926	14,02	83.926	14,02	80 399	13.36
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	37.507	6,26	37.507	6,26	46 916	7.80
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.490	1,42	8.490	1,42	9 197	1.53
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	120.874	20,19	120.874	20,19	122 892	20.43
Total	598.792	100.00	598.792	100.00	601 651	100.00

Sumber: Sakernas

Secara umum, struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan terbesar adalah mereka yang bekerja dengan status buruh/karyawan sebesar 32,45 persen, berusaha sendiri sebesar 27,33 persen dan pekerja tak dibayar sebesar 18,69persen.

Tabel 4.4. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku, 2012-2014

Status Pekerjaan	2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%
Berusaha sendiri	160.400	26,28	160.400	26,28	164 428	27,33
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	121.488	19,90	121.488	19,90	104 105	17,30
Berusaha dibantu buruh tetap	10.835	1,78	10.835	1,78	6 906	1,15
Buruh/karyawan	161.892	26,52	161.892	26,52	195 231	32,45
Pekerja bebas di pertanian	3.799	0,62	3.799	0,62	6 630	1,10

Pekerja bebas di non pertanian	12.383	2,03	12.383	2,03	11 877	1,97
Pekerja tak dibayar	139.565	22,87	139.565	22,87	112 474	18,69
Total	650.112	100,00	610.362	100,00	601 651	100,00

Sumber: Sakernas

<https://maluku.bps.go.id>
<http://maluku.bps.go.id>

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga dalam pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

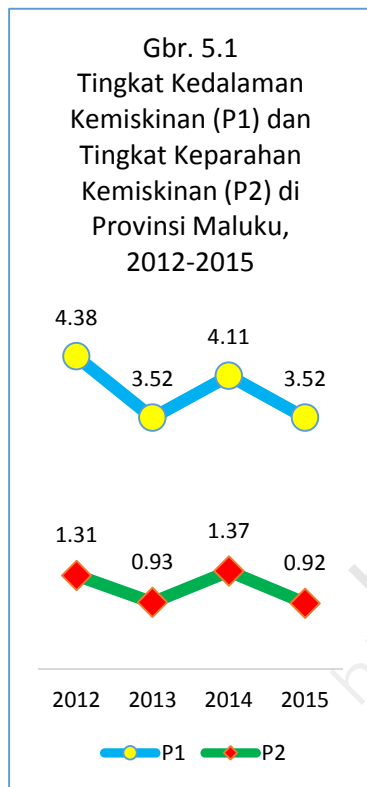
Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

5.1 Perkembangan Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100

kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count index* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seseorang yang miskin bertambah miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2).



Tingkat kedalaman kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2).

Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman indeks kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P_2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 5.1. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Maluku, Tahun 2012-2015

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015
1. Persentase Penduduk Miskin (P_o)				
- Kota	8,39	7,96	7,35	7,91
- Desa	28,12	26,30	25,49	26,90
- Kota + Desa	20,76	19,27	18,44	19,51
2. Poverty Gap Index / P_1 (%)				
- Kota	1,61	1,12	1,14	1,36
- Desa	6,03	5,00	5,99	4,89
- Kota + Desa	4,38	3,52	4,11	3,52
3. Poverty Severty Index / P_2 (%)				
- Kota	0,46	0,24	0,26	0,33
- Desa	1,81	1,36	2,08	1,30
- Kota + Desa	1,31	0,93	1,37	0,92

Sumber: Susenas

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku bertambah dari 18,44 persen pada tahun 2014 menjadi 19,51 persen pada tahun 2015. Jika dilihat menurut daerah, pola yang terjadi adalah persentasi penduduk miskin di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada daerah perkotaan. Pada tahun 2015 persentasi penduduk miskin di perdesaan ada 26,90 persen, sedangkan di perkotaan ada 7,91 persen.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dinyatakan oleh P_1 dan P_2 menunjukkan penurunan P_1 dan P_2 selama periode 2012-2015. Pada tahun 2015, P_1 turun menjadi 3,52 dari 4,11 pada September tahun 2014, artinya ada perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis

kemiskinan. Namun jika dilihat berdasarkan daerah, penurunan P1 hanya terjadi di daerah pedesaan, sedangkan P1 daerah perkotaan mengalami sedikit peningkatan. Begitu juga P₂ pada tahun 2015 turun menjadi 0,92 dari 1,37 pada tahun 2014, artinya ketimpangan kemiskinan antara sesama orang miskin juga semakin menurun.

5.2 Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Berbanding terbalik dengan peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2014-2015

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Kecukupan energi untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8, tahun 2004 sebesar 2000 kalori dan 52 gram protein.

Pada tahun 2014, penduduk Maluku rata-rata mengkonsumsi 1969,88 kkal dimana konsumsi kalori tersebut masih berada dibawah standar kecukupan. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk di daerah perkotaan mengkonsumsi energi lebih sedikit dibandingkan penduduk di daerah pedesaan. Sementara untuk konsumsi protein, pada tahun 2014 tercatat sebesar 57,39 gram, yang berarti nilainya berada di atas standar kecukupan. Sebagaimana halnya energi yang dikonsumsi, konsumsi protein juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.2. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita Hari di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
Energi (kal)			
2010	1.777,62	2.019,93	1.956,68
2011	1.771,88	1.866,13	1.841,53
2012	1.908,91	1.937,47	1.926,86
2014	1.901,68	1.993,88	1.969,88
Protein (gram)			
2010	50,88	49,55	49,90
2011	49,51	45,79	46,76
2012	58,85	51,23	54,06
2014	59,50	55,99	57,39

Sumber: Susenas Modul Konsumsi

5.3 Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Demikian pula yang terjadi pada tahun 2008, dengan pemerintah menaikkan harga BBM, berdampak secara berantai pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat khususnya rumah tangga miskin.

Pengeluaran per kapita per bulan selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan kembali meningkat di tahun 2014. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Maluku pada tahun

2014 sebesar 865.938 rupiah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 5.3. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) di Provinsi Maluku, Tahun 2010-2014

Tahun	Pengeluaran per kapita per Bulan (Rp)	Kenaikan Nominal Setahun (%)
2010	535.605	15,29
2011	770.023	43,77
2012	896.257	16,39
2013	723.271	-19,30
2014	865.938	19,73

Selama periode 2013-2014 pengeluaran per kapita per bulan meningkat sebesar 19,73 persen.

Sumber: Susenas

5.4 Perkembangan Distribusi Pendapatan

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator

pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperlihatkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Tabel 5.4. Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Gini di Provinsi Maluku, Tahun 2008-2013

Tahun	40 % terendah	40 % menengah	20 % tertinggi	Indeks Gini
2008	21,47	38,75	39,78	0,31
2009	23,37	37,46	39,17	0,31
2010	21,74	37,23	41,03	0,33
2011	16,02	36,37	47,60	0,41
2012	18,13	41,45	31,78	0,38
2013	22,89	44,97	32,14	0,37

Sumber: Susenas

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan apabila memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah, 12-17 persen dianggap sedang, dan jika memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan dianggap tinggi.

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain, yaitu Indeks Gini. Nilai dari Indeks Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran

semakin tinggi.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut, terlihat selama periode 2008-2013 tingkat ketimpangan pendapatan (dengan pendekatan pengeluaran) penduduk Maluku tergolong sedang. Hal ini tampak dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah pada tahun 2013 adalah 22,89 persen, naik dari tahun sebelumnya yaitu 18,13 persen.

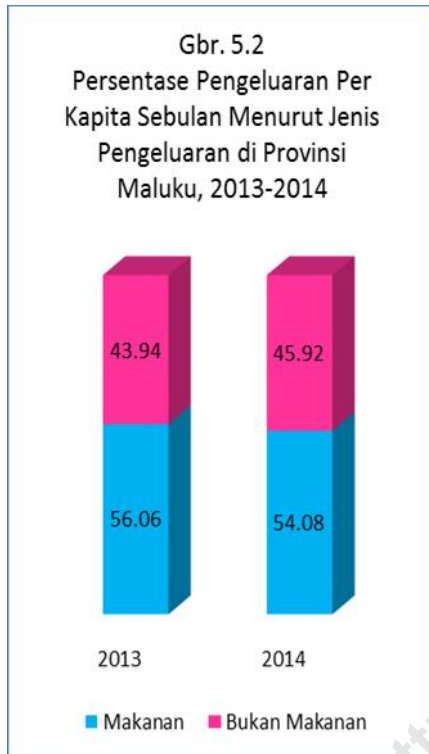
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Maluku tergolong rendah.

Demikian pula halnya dengan Indeks Gini. Pada tahun 2008 Indeks Gini tercatat sebesar 0,31, kemudian pada tahun 2009 menjadi 0,31 dan meningkat lagi menjadi 0,41 pada tahun 2011 yang mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang lebih besar pada tahun 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun pada tahun 2012 dan tahun 2013 indeks gini menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Tetapi Indeks Gini tersebut masih jauh berada dibawah angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran tergolong sedang, namun menunjukkan kecenderungan meningkat ketimpangan.

5.5 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk

yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.



Tabel 5.5. Pengeluaran Rata-rata Nominal (Rp) dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Maluku, Tahun 2013-2014

Jenis Pengeluaran	Nominal		Persentase	
	2013	2014	2013	2014
Makanan	05,487	68,278	56.06	54.08
Bukan Makanan	31,783	97,659	43.94	45.92
Jumlah	723,271	865,938	100,00	100,00

Sumber: Susenas

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2013 tercatat sebesar 56,06 persen, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 54,08 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk kelompok bukan makanan dibandingkan dengan makan dapat menunjukkan indikasi tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

*M*anusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Dengan sifatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol.

Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar.

Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal.

Kualitas bahan bangunan yang digunakan dapat dilihat dari jenis atap, dinding dan lantai yang digunakan. Ditambah lagi dengan luas lantai rumah yang dihuni, karena semakin kecil luas lantai maka kenyamanan rumah tersebut akan terganggu. Jenis lantai yang dilihat adalah apakah lantai yang digunakan oleh rumah tangga masih berupa tanah atau tidak. Karena lantai yang masih berupa tanah akan menimbulkan tingginya kelembapan udara dalam rumah sehingga penghuninya mudah terserang penyakit.

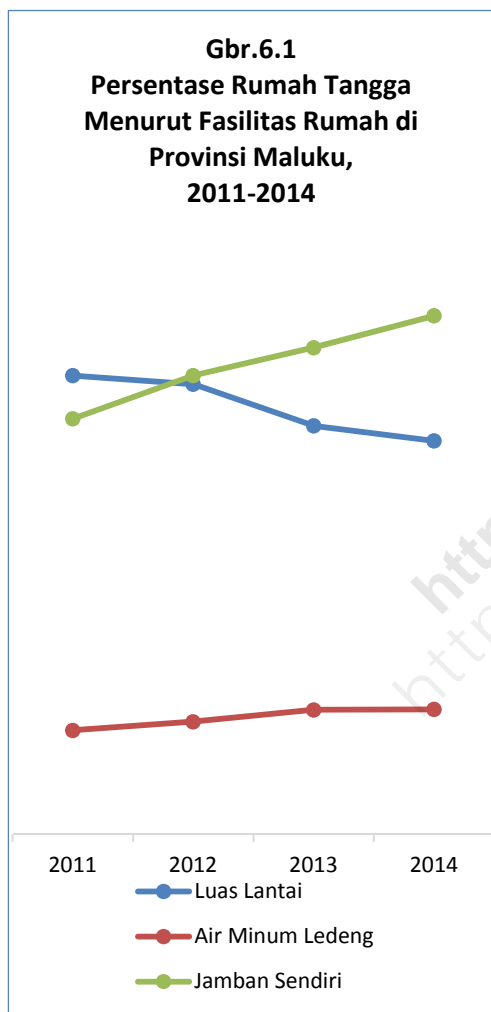
Tabel 6.1. Beberapa Indikator Perumahan di Provinsi Maluku, Tahun 2011 - 2014

Indikator Perumahan	2011	2012	2013	2014
Atap Bukan Ijuk/Lainnya	84,57	85,73	87,09	88,88
Dinding Tembok	67,01	70,23	70,84	71,42
Lantai Bukan Tanah	87,81	89,27	89,92	92,48
Fasilitas Air Minum Sendiri	24,26	28,07	32,81	34,93
Jamban Sendiri/Bersama	60,74	64,23	66,06	70,49
Tempat Pembuangan Akhir Tinja dengan Tanki	59,41	64,18	67,15	70,58

Sumber: Susenas

Secara umum, indikator perumahan di Provinsi Maluku

pada tahun 2014 menunjukkan indikasi yang semakin membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri, penggunaan jamban sendiri/bersama, serta tempat pembuangan akhir tinja dengan tangki. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Rata-rata anggota rumah tangga menurut Susenas pada tahun 2014 adalah 4,8 sehingga luas lantai minimal yang diperlukan sebagai rumah sehat adalah 50 m². Pada tahun 2014, luas lantai kurang dari 50 m² adalah 45,46 persen. Persentase rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 50 m² yang cukup besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru (66,81 persen) dan Maluku Barat Daya (62,86 persen).



Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya rumah tinggal tersebut, yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2014, rumah tangga di Maluku yang menggunakan air ledeng sebagai sumber air minumnya baru mencapai 14,43 persen. Sementara bila dilihat antar kabupaten/kota masih ada kabupaten yang memiliki rumah tangga pengguna air minum ledeng kurang dari sepuluh persen dan bahkan tidak ada fasilitas air minum ledeng di

Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Kurang dari 50m ²	Air Minum Ledeng	Jamban Sendiri	Listik PLN
Maluku Tenggara Barat	62.84	17.62	42.36	50.42
Maluku Tenggara	42.90	19.37	70.72	79.00
Maluku Tengah	43.22	14.92	66.72	90.02
Buru	40.24	4.17	61.95	76.74
Kepulauan Aru	66.81	18.75	32.03	38.08
Seram Bagian Barat	38.55	0.48	48.07	80.60
Seram Bagian Timur	42.64	0.00	28.27	60.15
Maluku Barat Daya	62.86	0.45	41.50	46.10
Buru Selatan	36.62	6.25	42.51	61.93
Ambon	43.74	27.94	77.49	99.85
Tual	36.27	10.08	73.80	89.76
Maluku	45.46	14.43	59.92	79.90

Sumber: Susenas

Fasilitas rumah tinggal lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri. Selama tahun 2014 rumah tangga yang memiliki jamban sendiri hanya 59,92 persen, lebih dari setengah jumlah rumah tangga di Maluku. Kabupaten yang memiliki rumah tangga yang telah memiliki jamban sendiri dengan persentase terbesar adalah Kota Ambon sebesar 77,49 persen.

Ketersediaan listrik di suatu daerah juga merupakan

fasilitas yang tidak kalah pentingnya. Dengan adanya listrik, rumah tangga dapat mengakses informasi lewat media elektronik seperti radio, televisi, internet dan lain-lain. Dengan informasi yang didapat secara tidak langsung juga telah menambah wawasan dan pengetahuan dari rumah tangga tersebut. Berdasarkan data Susenas tahun 2014 terdapat 79,90 rumah tangga pengguna listrik PLN. Bila dilihat menurut kabupaten, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN terendah adalah Kabupaten Kepulauan Aru (38,08 persen), Kabupaten Maluku Barat Daya (46,10 persen) dan Buru Selatan (61,93 persen).

Angka Beban Tanggungan
(Dependency Ratio)

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun).

Angka Harapan Hidup Pada Waktu Lahir
(Life Expectancy at Birth)
Angka Kematian Bayi
(Infant Mortality Rate)

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Total
(Total Fertility Rate)

Banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kesakitan
(Morbidity Rate)

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf
(Literacy Rate)

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin.

Angka Partisipasi Sekolah
(Enrollment Ratio)

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Partisipasi Murni
(Net Enrollment Ratio)

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai koefisien gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang

	mencerminkan ketidakmerataan sempurna.
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Luas lantai	Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak dan jemuran.
Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
Penduduk	Semua orang yang berdomisili di suatu wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Pengangguran Terbuka	Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah: <ul style="list-style-type: none"> - yang mencari pekerjaan. - yang mempersiapkan usaha. - yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. - Yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran	Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.
Pekerja Tidak Dibayar	Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji/upah.
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rata-rata Lama Sekolah (Means Years Schooling)	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pekerjaan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri atau swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Data Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

Jl. Wolter Monginsidi, Passo – Ambon 97232

Telp. (0911) 361320-361321, Fax. (0911) 361319

website: <http://maluku.bps.go.id> e-mail: maluku@bps.go.id



9 772442 712001